



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092
Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

RISALAH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Jenis Rapat : Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2. Hari/Tanggal Rapat : Kamis/ 9 November 2023
3. Waktu Mulai/Selesai : 13.00 WIB s.d. Selesai
 - a. Rapat Dibuka : 13.00 WIB
 - b. Rapat ditutup : 14.30 WIB
4. Tempat : Ruang Rapat Serbaguna Lt.III,
DPRD Provinsi Kepulauan Riau
5. Sifat Rapat : Tertutup
6. Acara / Materi Rapat : Rapat Pembahasan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperda)
Tahun Anggaran 2024
7. Pimpinan Rapat
 - Ketua : H. Lis Darmansyah, S.H.
 - Wakil Ketua : Drs. Khazalik
8. Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri	F. Nasdem
5.	H. Lis Darmansyah, SH	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan
6.	Drs. Khazalik	Wakil Ketua Bapemperda	F. Nasdem
7.	Ery Suandi	Anggota	F. PDI-Perjuangan
8.	Asmin Patros, SH., M.Hum.	Anggota	F. Golkar
9.	Kamaruddin Ali, SH.	Anggota	F. Golkar
10.	H. Muhammad Taufiq, SH., M.M.	Anggota	F. PKS
11.	H. Muhammad Syahid Ridho, S.Si.	Anggota	F. PKS
12.	Ir. Onward Siahaan, SH., M.Hum.	Anggota	F. Gerindra
13.	H. Surya Sardi, ST., M.M.	Anggota	F. Demokrat
14.	Alex Guspeneldi, SH., M.H.	Anggota	F. HARAPAN
15.	Dr. H. Irwansyah, SE., M.M.	Anggota	F. PKB-PPP
16.	Sirajuddin Nur	Anggota	F. PKB-PPP
17.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

9. Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Lis Darmansyah, SH.	Ketua Bapemperda	F. PDI-Perjuangan

10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kuntum Purnomo, SH., MH	Ka. Biro Hukum	
2.	Dr. Drs. H. M Juramadi Esram, MT	Ka. Disbud	
3.	Hendri Kurniadi	Kepala Satpol PP	
4.	Isra Gigantara, S.Sos., M.Si	Kabid Ideologi WaKebang	
5.	Diana Novianti	Ka. PUU	
6.	Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng	Kabid tata ruang	
7.	Budhiharti	Kabid Adtra	
8.	Wan Rabdi	Sekbid disbud	
9.	Osnarji	Kabid SDA	
10.	R. Guntur	Kasi Wasdak	
11.	Weldy Anja R	Tata ruang	
12.	Sahrizan	Kasi OPS Pal Pol PP	
13.	Purnomo	Perencana	
14.	Heri Sandi	Sekbid	
15.	R. Satria Putra	Biro hukum	
16.	Budi Utomo	Satpol PP	
17.	Dedi	Satol PP	
18.	Fitri Yulisa	Pamong Budaya	
19.	Eko C	Satpol PP	

11. Jalannya Rapat

H. Lis Darmansyah, SH

Assalamualaikum Wr.Wb. langsung saja terkait hasil identifikasi propemperda yang dilaksanakan tahun 2023 ini ada beberapa catatan penting yang saya lihat ketidaksiapan kita, kedua ada yang sudah siap tetapi hingga berulang-ulang saya sampaikan jika surat Gubernur atau surat daripada yang didelegasikan kepada Sekda untuk menyampaikan produk hukum yang disampaikan maka produk hukum itu tidak mungkin dijadwalkan, maka ada beberapa hal yang saya sayangkan yaitu terkait dengan pertama dengan penanggulangan bencana lalu RUED sudah selesai RT RW belum hingga hari ini persiapannya lalu pendirian BUMD energi migas lalu pemberian insentif pemberian kemudahan investasi, lalu terkait RT RW itu juga karena bukan kita yang desak kalau tidak sudah hamper-hampir tidak dibahas, dan juga tentu terkait dengan penyelenggaraan pelayaran dan penyertaan BUMD ini hal-hal yang mungkin yang tidak sampai hari ini saya desak mana yang ingin dimasukkan meski DPRD sedang ada dalam tahun-tahun politik oleh pemerintah suka tidak suka mau tidak mau harus di jadwalkan, ini yang mungkin jadi catatan penting kita, dari hasil ini saya tidak tahu sampai kapan apakah ada rencana ingin memasukkan beberapa Perda lagi, saya tanya dulu pak karo.

Kuntum Purnomo. SH., MH

Untuk nomor 8 dan 9 penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemberian insentif kemudahan investasi itu sudah kita sampaikan sebenarnya ke DPRD, belum di Banmus kan.

H. Lis Darmansyah. SH

Maksud saya ini bukan perda-perda yang sulitlah, perda paling lama tiga minggu bisa selesai.

Kuntum Purnomo. SH., MH

Kemudian nomor 10 dan 11 itu terkait rekomendasi dari pusat yang belum, kan RPJMD BUMD energi migas dan penyertaan modalnya.

H. Lis Darmansyah. SH

Dengan yang pelayaran, bagaimana.

Kuntum Purnomo. SH., MH

Yang pelayaran sampai hari ini belum menyesuaikan dengan yang baru. Ini pernah sudah beberapa tahun yang lalu sebelum kira membahas RZ BP3K pernah secara simultan NA nya dan Ranperdanya disampaikan ke Biro Hukum belum sampai, hanya menunggu itu diselesaikan, namunkan terakhir regulasinya untuk di integrasikan ke tata ruang.

H. Lis Darmansyah. SH

RT RW?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Mengenai RT RW semoga nanti minggu depan kita konsultasi produk kedua, mengapa kita sedikit terlambat karena memang ada kaitannya dengan perencanaan tata ruang kawasan nasional Batam Bintan Karimun, dimana muatan-muatan harus kita masukkan hanya saja draft akhir di bulan Juni itu tidak sesuai dengan BP3K apabila kita masukkan ke dalam RT RW kita yang baru ini jadi nanti sesuai dengan aturan Permen kami tahun 2021 nomor 28 terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang laut kita harus merubah RZ BP3K jadi kita sudah terbayang lamanya seperti apa. Minggu lalu kita sudah sepakat dengan kementerian ATR BPN bahwa untuk sampai kita memasukkan elinasi yang terakhir di bulan juni memang informasinya kita menunggu waktu itu akan keluar dibulan oktober tapi hingga saat ini belum keluar perpresnya, nanti dikonsultasikan public kedua maupun kita tetap masukkan elinasi yang ini apabila nanti kita linsek hingga ke persub tidak ada kita akan keluarkan, atau dengan catatan ada kepastian ke kita bahwa andai kita memasukkan materi yang ada yang belum ada pengesahan hukumnya itu tidak membuat RZBP3K berubah, jadi posisi kita kemarin memang tersandera dengan itu.

H. Lis Darmansyah, SH

RZ BP3K itu sudah di koordinasi? Sebenarnya produk hukumnya tidak masalah disana, tinggal di integrasikan saja menjadi satu perda kan?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Jadi saat di integrasi kita sudah materi teknisnya tidak ada berubah.

H. Lis Darmansyah, SH

Sudah di harmonisasi pak?

Kuntum Purnomo, SH., MH

Sudah di evaluasi pak RZ BP3K.

H. Lis Darmansyah, SH

Harmoniasi dengan PU, dudukkan satu meja.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Kalau hasil dari regulasi mengintegrasikan ini belum.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Kalau dengan DKP dengan kami terkait dengan RZ sudah harmonisasi, belum selesai nanti sudah terbentuk.

H. Lis Darmansyah, SH

Harmonisasi itu harus di fasilitasi oleh Biro hukum.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Rencana kami nanti setelah konsultasi yang public kedua sudah terbentuk keseluruhannya lalu kami ke Biro hukum dan ke Kemenkumham, kami punya draft ini sudah selesai draft Perda kita.

H. Lis Darmansyah, SH

Seharusnya kalau sudah selesai artinya begini porsinya OPD pengusul itu sudah selesai karena melakukan harmonisasi nanti ada catatan-catatan itu di konsultasikan di public keduanya boleh dilakukan, tapi belum ada catatan dari hukumnya belum nanti sudah selesai uji publik yang kedua tidak mungkin beli lagi konsultasi publik lagi, NA nya sudah selesai?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Sudah draft pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Ini bahan saya yang terkait dengan Perda jadwal, proses tahapan, agar kawan-kawan ini paham proses tahapan ini bagaimana, proses mengajak biro hukum ini dimana, proses porsi OPD pengusul dimana, jadi misalnya PU mengatakan sudah diharmonisasi dengan DKP legal standingnya tidak ada dimana seharusnya.

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Waktu rapat perda itukan tahapan kami mengacu pada itu, hanya saja jika kami mendengarkan biro hukum ini kemungkinan nanti misalnya DKP masih ada perbaikan masukan kita harus balik lagi ke Biro hukum, maksudnya kami ini polanya sudah terbentuk lalu kami ke biro hukum.

H. Lis Darmansyah, SH

Karena biro hukum itu sudah mulai proses perencanaan terlibat.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Sebenarnya RZBP3K belum ada regulasi untuk diintegrasikan ke tata ruang tahapan evaluasi menunggu hasil evaluasi.

H. Lis Darmansyah, SH

Karena itu saya katakan seharusnya sudah diharmonisasikan, begitu rancangan draft nya diintegrasikan rancangannya jadi seperti ini seperti itu, itu fungsi biro hukum. Sekarang RT RW nya dalam datanya sudah final?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Belum pak, tapi proses integrasi.

H. Lis Darmansyah, SH

Proses tahap perencanaan itu bagaimana? Perencanaan awal itu uji publik sudah dilakukan dalam rangka menyusun naskah akademis, kalau ini tahap penyusunan propemperda, sebenarnya kita sudah melewati itu. Harmonisasi oleh kementerian hukum dan ham, monitoring dan harmonisasi oleh Bapemperda, rancangan perda ini sudah beda sebenarnya tinggal ini prosesnya, tapi proses perencanaan itu sudah bagian hukum sekretariat daerah melakukan penyelarasan NA dan draft rancangan perda untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum provinsi, tahap perencanaan sudah terlibat, nanti jika tidak terlibat akhirnya itu. Jadi yang terkait RT RW ini disegerakan, sampaikan surat kepada Biro Hukum untuk dilakukan sinkronisasi dengan NA, harmonisasi internal kita.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Nanti sebelum kami konsultasi publik kedua.

H. Lis Darmansyah, SH

Mengapa sampai uji publik kedua?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Syarat ketentuan Perpres dan Permen tentang RT RW itu dua kali pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Berarti harmonisasi dengan dua OPD langsung, artinya DKP terlibat disitu uji publik kedua.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Tidak pak, kalau secara dokumen RZ itu sudah diserahkan pada kita untuk di integerasi. RZ itu terkendala Perdana karena undang-undang sehingga waktu penyerahan kita minta dari Kementerian maupun dari Gubernur itu RZ tidak berubah, jadi kita lanjutkan, proses yang sedikit susah di pesisir, di pesisir ini akan ada berbenturan juga.

H. Lis Darmansyah, SH

Ada perlu revisi terkait BP3K itu, tentu ada beberapa koreksi.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Kita tidak ingin terlibat penyesuaian.

H. Lis Darmansyah, SH

Makanya nanti itu melibatkan catatan-catatan Biro Hukum itu nanti yang difasilitasi dua OPD ini untuk melakukan penyesuaian, tidak mungkin nanti didalam contoh ada direncana daripada dinas DKP disitu ada reklamasi pada kita mungkin tidak ada, tentu perlu penyesuaian itu bukan PU yang memfasilitasinya tapi Biro Hukum.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Di kita tidak menggambarkan laut di 2017, kalaulah memang di RZ BP3K ada reklamasi, kita masukkan karena.

H. Lis Darmansyah, SH

Tapi tidak selamanya bisa kita masukkan, kalau didalam perencanaan PU itu, missal bukan kawasan industri sudah beda lagi peruntukannya. Kalau PU berjalan sendiri nanti jadi lama. Berikutnya kembali lagi, bagian penanaman modal ada? Tidak ada ya. Kira-kira yang mana dulu bisa diselesaikan pak karo?

Purwanto

Bahwa informasi terakhir dari staf khusus sudah dinaikkan ke menteri dalam negri jadi kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa keluar rekomendasinya, kami harapkan secepatnya.

H. Lis Darmansyah, SH

Jadi kalau sudah ada kepastian maksudnya pak Sekda itu menyurati terlebih dahulu memang ada kepastian, kalau tidak nanti sudah masuk masa sidang berikutnya. Jadi tolong di koordinasikan paling tidak beliau melaporkan kepada Gubernur untuk segera di percepat.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Saya dapat informasi bahwa anggaran tahun yang akan datang dikhawatirkan anggarannya tidak ada.

H. Lis Darmansyah, SH

Tahun ini ada, tahun depan yang tidak ada. Makanya nanti di APBD harus geser ini, dan skala prioritas pertama itu sudah duduk, februari. Jadi yang belum bisa berikan gambaran BUMD energi migas, penyertaan modal, penyelenggaraan pelayaran, ini yang termasuk disesuaikan pak, jadi pada saat harmonisasi internal mereka diajak saja, dishub ada? Tidak ya, lalu penanggulangan bencana tinggal di jadwalkan dan investasi, RT RW belum. Pak karo jadi ada tiga yang masih belum ada bisa kita pastikan karena kalau pelayaran ini memang betul. Sekarang perda tentang pemanfaatan permukaan dasar laut yang sudah disahkan beberapa tahun lalu 2011 kalau tidak salah, itu perdanya sampai sejauh ini seperti apa, itu juga harus diintegrasikan dengan RT RW ya pak karena kita ada perda sebelumnya ada 82 produk hukum yang sejak undang-undang nomor 6 ini memang harus dilakukan penyesuaian, jadi tugas pak karo memberikan kepastian terkait dengan harmonisasi internal di tiga perda ini, 10, 11, 12 dan PPBD dan insentif nanti tinggal, RT RW belum ada kepastian, saya tidak yakin RT RW bisa masuk tahun ini, jadi geser saja tahun depan, apa ada anggarannya tahun depan? Terakhir pakai data tahun berapa?

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

2021-2022 pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Untuk 2024 harus diperbaharui itu. Jadi yang RT RW kita sepakati pak karo dan langsung dilaporkan ke BPKAD, tahun ini ada pak?

Kuntum Purnomo, SH., MH

Ada pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Nanti harus digeser memang, jangan nanti sampai ditetapkan anggaran itu tidak bergeser dan diantisipasi juga dengan perda BUMD ini karena kita batas oktober kita sudah lewati, masalahnya sampai hari ini persetujuan dari kementerian belum ada juga jadi kalau memang begitu jangan kita paksakan kita undur di triwulan tahun depan,

tidak akan mungkin terkejar ini pak karo. Kalau BUMD triwulan pertama, kalau penyertaan modalnya tinggal bisa kedua realokasi saja karena belum ada anggaran. Yang menjadi prioritas kita itu BPBD dan PTSP jadi kita selesai, artinya target capaian kita bisa tercapai, setuju pak karo.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Iya setuju pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Selanjutnya kita masuk pada rencana Bapemperda tahun 2024, disini kita masih masukkan opsi pertama terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, opsinya kita lakukan di tahun ini dan pemberian insentif kalau bisa kita laksanakan di tahun ini, mudah RT RW ini target saya sebelum APBD diketok, 3-4 hari kita selesaikan. Berikutnya ada RT RW ini sudah kita masukkan tahun depan, pendirian perubahan perda tentang RT RW di triwulan kedua bulan apa, kita buat catatan saja dahulu.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Bulan juli atau agustus.

H. Lis Darmansyah, SH

Masukkan ke bulan agustus saja, nanti berlarut-larut, masukkan agustus saja di masa sidang kedua. Lalu pencegahan pemberantasan peredaran narkoba bulan apa, januari hingga maret sudah siap semuanya? Lihat kelengkapan dokumennya. Saya ingin melihat dahulu, penyelenggaraan penanggulangan bencana naskah akademisnya sudah ada, SK tim sudah, uji publik belum, bagaimana naskah akademisnya sudah tapi belum uji publik, makanya seharusnya ditahapan perencanaan itu tidak lengkap, uji publik selesai secara otomatis NA nya selesai, karena sebelum NA sedang disusun disaat itu di uji publik, makanya nanti berikan bahan pada biro hukum, makanya kita buat ceklik agar tidak ada yang terlewat. Seperti kebiasaan kita dulu di RUED, sudah mengatakan siap semuanya akhirnya yang terjadi saat dibongkar NA nya, saya belajar dari RPIP pak 7 bulan dokumen RPIP selesai, saat kita sinkronkan dengan Kabupaten Kota berlawanan semua datanya, misal contoh dikawasan kita ada 1200 hektar kawasan industri ternyata didalam rencana oleh Kabupaten Kota 2000 hektar, ada kawasan menurut kita bukan kawasan industri ternyata disitu oleh Kabupaten adalah kawasan industri, contoh di Dabo ada perkebunan Kepala sudah direncanakan 800 hektar tapi di data kita tidak ada, coba bayangkan jika sahkan apa yang terjadi dengan perda kita, pasti tidak jalan. Jadi ini sebagai pembelajaran saja, jadi kalau ini saya minta kapan rencana uji publiknya?

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Desember pak

H. Lis Darmansyah, SH

Lama sekali jika desember. Bisa jalan saja dulu.

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Kita sudah mulai pembahasan data NA sekalian barulah kita harmonisasi.

H. Lis Darmansyah, SH

Bahasa premannya ini cacat prosedur itu.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Ijin ketua, tidak sekurangnya ketika memberikan sosialisasi pada saat penyusunan NA uji publik itu masuk ke tahap pada saat laporan awal hasil uji publik pertama sudah ada kemudian laporan akhir minimal dua kali.

H. Lis Darmansyah, SH

Begitu bapak-bapak merencanakan produk hukum pertama satu yang harus dilakukan, adalah SKT.

Purnomo

Ijin pak SKT nya itu 2022 sudah selesai sampai NA tapi karena anggarannya tidak masuk, anggarannya masuk lagi 2023 ini kita buat lagi untuk agenda uji publik dan harmonisasi.

H. Lis Darmansyah, SH

Jadi SKT itu berlakunya hingga perda nya di tetapkan, jadi kalau kita mengundang mengajak RTB maka yang dibawa tim saja. Jadi saya minta pak artinya tahapan itu tolong diperbaiki, jika SKT itu memang sudah ada kita lanjutkan perubahan, bunyinya jangan SKT tentang ini sementara dulu sudah ada kalau ingin itu adalah perubahan saja, prosesnya uji publik bagaimana bunyinya karena NA nya sudah selesai, kita pakai kata sosialisasi saja bisa sebelum bisa sesudah.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Ini baru tahap perencanaan kan.

H. Lis Darmansyah, SH

Kalau tidak bunyinya satukan uji publik dan sosialisasi, yang penting prosesnya tidak cacat, jangan terlalu terbuka. Jadi bulan apa masuknya? Triwulan pertama sampai bulan april.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Terkait anggaran yang ada ini penyusunan NA, ketika pembentukan perdanya.

H. Lis Darmansyah, SH

Kira-kira kapan? Di akhir triwulan pertama bulan april. Jadi tidak sudah di tanya, begitu sudah bulan april langsung masuk, jangan kita tunggu, kalau bisa maret sudah masuk april sudah di bahas. Sudah jelas ya. Dan hati-hati menyempurnakan itu agar prosedurnya apalagi ini tentang narkoba, perda ini memang perda teknis sekali. Berikutnya penyertaan modal, kemajuan kebudayaan, pak Isra sudah selesai semua pak?

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Sudah pak.

H. Lis Darmansyah, SH

SK tim sudah? Ini proses sampai mana ini tahapannya pak Isra, NA sudah selesai?

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Sudah siap.

H. Lis Darmansyah, SH

Na sudah siap uji pabrik berarti tentu sudah dan hati-hati pak uji pabrik jangan sampai kita ngumpulkan OPD itu sudah uji pabrik itu memang harus ada keterlibatan masyarakat, terus nanti di lampirkan saja pak isra pada saat ini nanti disampaikannya pada saat kita bacakan lampirkan oke. Terus harmonisasi sudah bapak internal?

Kuntum Purnomo, SH., MH

Harmonisasi secara internal di biro hukum itu belum disampaikan ke kami.

H. Lis Darmansyah, SH

Belum, oke berarti yang pemajuan kebudayaan? Nah sekarang pak isra saya mau bertanya terkait dengan bangunan bercirikan melayu ini, perda nya kan sudah ada implementasinya kan tidak jalan, apakah pemajuan kebudayaan unsur itu bisa kita masukan juga

Dr. Drs. H. M Juramadi Esram, MT

Izin pak di OPK itu sudah dibunyikan ada sepuluh OPD. Disesuaikan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kebudayaan jadi bersinergi nanti dengan perda bercirikan melayu.

H. Lis Darmansyah, SH

Cuma sekarang bagaimana pergubnya belum siapkan, udah setahun, udah berapa tahun juga ya empat tahun lah saya di dewan empat tahun, maksud kita kalau itu di terapkan kan sudah harus di berlakukan, pergub bangunan bercirikan melayu artinya nanti ruko itu nanti sudah mulai ada zonasi-zonasi. Pergub nya belum ada perdanya sudah ada, pak karo kapan pergubnya nanti kita surati saja ke Gubernur.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Izin ketua terkait dengan model bangunan tadi itu yang kita khususkan untuk yang APBD. Kalau misalnya terkait semua ini terbentur dengan ini pak kayak instansi vertikal itu mereka punya prototype sendiri pak.

H. Lis Darmansyah, SH

Tidak ada masalah, contoh di Bali inikan kita mencotohkan itu yang menjadikan daerah kita ini jadi setiap dalam tatanan bangunan dia ada ciri khasnya misalnya contoh unjuk langitnya atau mungkin yang namanya, ada ukiran-ukiran melayu nya dan sebagaimana dia sederhana saja.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Nah kemarin itu pak yang lagi dibangun ini kan pengadilan tinggi yang lagi dibangun sekarang ini, sudah kami anjurkan pak untuk memasukan ornamen melayu ornamen kita kan tapi mereka menjawabnya seperti itu.

H. Lis Darmansyah, SH

Tidak masalah dia mau bangunan kotak sekalipun tidak masalah tapi dia ada ciri-ciri nya makannya bangunan bercirikan melayu, Nanti kita surati saja bapem surati pimpinan, pimpinan surati ke gubernur bahwa itu harus di implementasikan. Implementasi perda itu teknisnya itu ada di PU terkait dengan pemberian izin IMB ini kaitannya dengan IMB sama PTSP. Iya paling tidak kan ada rekomendasi, rekomendasi kan tetap ya oke pak isra berarti udah clear, bulan apa pak Isra januari? Febuari? Bulan apa pak.

Isra Gigantara, S.Sos., M.Si

Febuari boleh.

H. Lis Darmansyah, SH

Oke febuari, tidak apa setelah pencoblosan tidak apa, ini bisa kaya RT RW juga juga lah ini serahkan sama bapem selesai target kita dua minggu clear. Dinas kebudayaan oke yang lainnya rutin, kalau seandainya nanti tentang perda penyelenggaraan pelayaran bawah laut ini kita mendekat atau tahun ini juga atau gimana? Dishub nya tidak ada udah kita masukkan saja dekat-dekat RT RW masa sidang kedua.

Kuntum Purnomo, SH., MH

Ada satu lagi izin ketua karena pada saat kami mencoba memfasilitasi rapat Propemperda untuk lingkungan pemprov itu tidak adil sehingga tidak kami usulkan namun Ranperda yang sedang mereka coba untuk usulkan.

H. Lis Darmansyah, SH

Ada suratnya?

Kuntum Purnomo. SH., MH

Surat usulan ada pak

H. Lis Darmansyah. SH.

Surat ke bapemnya ada?

Kuntum Purnomo. SH., MH

Tidak kami masukan karena pada saat untuk kami memfasilitasi rapat itu pak kawan-kawan dari Satpol tidak hadir jadi saya belum dapat gambaran.

H. Lis Darmansyah. SH

Panggil pak kadisnya dulu pak kabagnya dulu.

Mashudi Kurniawan. SH., MH

Pak karo setelah kita lihat kembali surat yang disampaikan tadi menjelang lampirannya itu untuk ruang laut belum masuk dalam surat?

Kuntum Purnomo. SH., MH

Karena pada saat rapat juga itu perhubungan tidak hadir tidak menghadiri jadi kami tidak memasukannya karena kami tidak dapat informasi apakah ini di ajukan kembali atau tidak kami yang ada saja, tinggal kembali pada rapat ini pak.

Firman Heydir Effendie S.T., M.Eng

Sebenarnya kalau secara perizinan pemanfaatan ruang laut itu adanya di KKP sekarang, kalau misal pelayaran ini apanya.

Kuntum Purnomo. SH., MH

Inikan dulu masih ada muatannya ketika RZ BP3K itu selesai dan itu menjadi perda bagaimana memanfaatkan ruang lautnya itu.

Purnomo

Kalau pemanfaatan ruang laut semuanya sudah zonanya sudah tergambarkan pak di RZ BP3K itu zonanya yang mana perikanan tangkap, yang mana konservasi, yang mana pariwisata.

H. Lis Darmansyah. SH

Makannya ini harus diharmonisasikan. Penyelenggaraan pelayaran ruang laut itu di hilangkan saja, orang nya juga tidak ada kan kita undang kan hari ini.

Mashudi Kurniawan. SH., MH

Usulan masukan dari Sekda pun tidak masuk juga.

Kuntum Purnomo.SH..MH

Kalau berdasarkan itu termasuk teman-teman satpol ini kan sebenarnya mengajarkan itu karena ketidak hadirannya mereka juga pada saat rapat yang kami sampaikan kemarin sementara mereka sudah siap pak, kalau perhubungan memang karena tidak hadir dan juga tidak mengusulkan di surat kami tidak dijawabnya kalau satpol pp menjawab pak hanya karena beliau tidak hadir saja saya menggal kesiapannya sampai dimana itu yang belum dapat.

Mashudi Kurniawan.SH..MH

Setelah ini dikirim juga mengejar komunikasi ada?

H. Lis Darmansyah.SH

Terkait dengan satpol mengenai apa?

Hendri Kurniadi

Izin ketua ini perda trantibum linmas memang secara kewajiban ini kan harusnya kita punya satpol pp sebagai opd tanpa perda ini rasanya eksekusi untuk semua perda-perda yang dilakukan itu kayanya kita rinci jadi kami yakin dengan perda trantibum linmas ini jika dilaksanakan NA nya sudah kita buat bahwa akan ada disitu penegakkan hukum yang jelas.

H. Lis Darmansyah.SH

Ini mumpung pak, perubahan RPJMD saya mengingatkan semua pada opd yang memiliki tusi PPNS, PPNS kalian berapa sekarang?

Hendri Kurniadi

Untuk di kita sekarang ini sedang diklat dua saya sendiri baru selesai PPNS

H. Lis Darmansyah.SH

Untuk saat ini berapa orang?

Hendri Kurniadi

Bahwa di satpol sendiri ada lima tapi kemudian kita sudah punya sekretariat bersama PPNS yang di ketuai oleh satpol pp pembinaannya adalah gubernur setiap PPNS di OPD sudah bisa kita perintahkan dan SPPD nya juga ditanggung oleh satpol pp jadi semua pergerakan PPNS sekarang semua satu sekretariat artinya setiap kegiatan bisa setiap bulan kita bisa melakukan penegakan PPNS mana yang akan kita lakukan.

H. Lis Darmansyah.SH

Nah yang jadi masalah itu begini contoh lingkungan hidup paling banyak kan pelanggaran lingkungan hidup PPNS nya hanya dua.

Hendri Kurniadi

Nah begini ketua kita bisa bantu dengan PPNS yang lain

H. Lis Darmansyah.SH

Tetapi kan bicara soal lingkungan hidup ini berbeda, maksud saya didalam program perencanaan kebutuhan seluruh Pemprov ini yang terkait dengan PPNS itu berapa orang kalau nanti kalian tidak masukan di dalam dokumen perencanaan bahwa itu kebutuhan dalam jangka waktu lima tahun ini proses perencanaan kita punya sekian orang, artinya di sesuaikan antara progres perencanaan baru nanti dukungan daripada anggaran, kita tahu lima tahun sekarang misalnya jumlahnya tiga puluh se kepri ini mungkin kita butuh misalnya sekitar lima puluh, artinya selama lima tahun ini kita backup dua puluh orang yang kita persiapkan untuk itu.

Hendri Kurniadi

Izin ketua seringnya opd itu tidak punya dana PPNS.

H. Lis Darmansyah.SH

Karena dia tidak masuk di dalam perencanaan dia.

Hendri Kurniadi

Betul makanya dengan ada sekretariat bersama PPNS di satpol pp sesuai dengan permendagri dana-dana untuk PPNS di opd lain bisa kita tanggulang di pol pp karena memang disitu penyidik yang boleh memerintah kan turun untuk melakukan penyidikan sementara kepala opd bukan penyidik artinya PPNS di dinas itu tidak bisa di perintah oleh kepala opd nya, bisa di perintah oleh kasat Polpp yang memang sudah PPNS.

H. Lis Darmansyah.SH

Inikan pelajaran saya masalah terkait pembangunan yang terkait dengan banjir kan endingnya kan tidak selesai juga iya kan, terus akhirnya ada sekretariat yang terkait dengan ekonomi PPSK itu salah satu contoh. Maksud saya artinya kan mumpung ada perubahan RPJMD artinya hendri sebagai ke sekretariatan terkait dengan PPNS ini maksud saya opd-opd mana yang panggil, jangan sampai nanti di perencanaan mereka tidak masuk tapi mereka butuh. Karena targer saya mudah-mudahan dua minggu ini selesai.

Hendri Kurniadi

Saya mohon dukungan ketua karena Pol pp kan penegak perda tapi tanpa adanya perda itu memang kami kesulitan, sementara juga sudah ada SK Gubernur di ketuai oleh kasat Pol PP yang juga PPNS.

H. Lis Darmansyah. SH

Bahannya sudah lengkap semua?

Hendri Kurniadi

Sudah pak.

H. Lis Darmansyah. SH

Di kasikan saja di lampirkan.

Hendri Kurniadi

Jika ini terlaksana kami lebih kuat untuk melakukan penegakan perda.

H. Lis Darmansyah. SH

Ini contoh ya itukan kawasan provinsi salah satunya.

Hendri Kurniadi

Gurindam dua belas.

H. Lis Darmansyah. SH

Seperti itu, yang kedua dekat kawasan taman migas.

Hendri Kurniadi

Terus disini juga kita sudah koordinasi dengan provinsi lain yang juga seringnya kan ketika kita melakukan penegakan hukum di siku ke PNPB ini sekarang kita bisa ke perda apa ke kas daerah, jadi seringnya kan kita lakukan penegakan hukum ketika ada kasus dana yang di setor itu ke PNPB nah sekarang ini kita minta ke perda ke kas daerah, dan itu inisiasi nya dulu dari kejaksaan agung yang dulu menjadi kejari cilacap tanda tangannya masih ada bahwa itu boleh masuk ke kas daerah, artinya dengan perda ini semua izin-izin bisa kita periksa di pasal 21 ketua.

H. Lis Darmansyah. SH

Inilah kadang-kadang kita lihat ya dalam menyusun NA ini mohon maaf ya kalau saya lihat ini NA sedih loh hen, coba kamu baca mulai dari landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya, artinya kita bicara tentang kearifan lokal pak persoalan yuridis di tanjungpinang itu apa, memang dasar pertama adalah ketentuan tentang peraturan perundang-undangan tapi yang berkembang itu yang kita rasakan itu apa, makannya kalau bicara soal landasan sosiologisnya kita bicara sudah kearifan lokal persoalan-persoalan ketertiban, yang menjadi masalah di provinsi kepri itu apa. Sejak saya di bapem lah ya kita udah merangkap kayak staf ahli kita sudah merangkap kayak konsultan. Naskah akademisnya terlalu sederhana, tinjauan akademisnya tidak masuk. Tapi begitu bicara soal perda RUED fungsinya pengawasan kan pelaksana kan ada di kabupaten/kota yang melaksanakan itu adalah kita melakukan pengawasan, waktu itu

kalau kita tidak bilang desak kita bikin kan tentang sanksi tapi dalam sanksi satu kesatuan bab, baca lagi undang-undang 12 tahun 2011 tidak boleh seperti itu. contohnya ginilah dia harus menganalisis terkait dengan perda, artinya proses-proses pelanggaran misalnya di wilayah kita di provinsi kepri kan dia harus bicara itu, ya pak hen ada timnya masih?

Hendri Kurniadi

Masih.

H. Lis Darmansyah. SH

Nanti kita panggil dia biar kita suruh perbaiki, nah inikan contoh pak hen saya kan ada bikin makannya kenapa kami bikin kan gini semua supaya kawan-kawan itu begini tidak usah kita seperti mengurus inikan kesannya kayak saya mengajarkan padahal tidak, ini sudah ada aturannya filosofis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum kita bicara soal local wisdomnya itu. berikutnya sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa produk hukum itu di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara artinya masyarakat mana? Jangan kita terbuat perda kita bicara nasional. Nanti pak Kuntum tolong kasih tahu Junaidi perda ini mau dihilangkan atau tetap.

Kuntum Purnomo. SH., MH

Baru saja di kontak saya ketua dia sampaikan itukan semua tergantung dengan RZBP3K yang terintegrasi dengan itu setelah itu apa baru kami pakai kembali.

H. Lis Darmansyah. SH

Sebenarnya ini memang harus di lebur, jadi catatan saja catatan disampingnya yang nomor 12 integrasinya RZBP3K. Jadi catatan di perda ini apakah jadi satu kesatuan kah apa kita bikin di pisah kalau omnibuslaw kan di jadikan satu, kalau omnibuslaw integrasinya kan harus di satukan karena kalau terkait dengan RZBP3K itu dia harus di satukan dengan RT RW. Jadi sekali lagi saya ulang pak untuk masa sidang propemperda kita ada 15 perda dari hal ini sebelum saya tutup ada yang mau di koreksi?

Isra Gigantara. S.Sos., M.Si

Untuk terkait nomor 4.

H. Lis Darmansyah. SH

BUMD kan masih fleksibilitas kita masih space kan untuk tahun 2023, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada lagi bapak-bapak sekian terima kasih atas waktunya dan ini yang kita sampaikan dan selanjutnya rencana propemperda kita tahun 2024, terima kasih assalamualaikum WR.WB.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DISEPAKATI BERSAMA OLEH:
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA BAPEMPERDA,



H. LIS DARMANSYAH, S.H.

WAKIL KETUA BAPEMPERDA,



Drs. KHAZALIK